

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022



INSPEKTORAT
KABUPATEN CIREBON



RENJA PERUBAHAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Dokumen RENJA Perubahan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 memuat Lima bab, antara lain : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024, Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cirebon, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Tujuan dan Sasaran memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat serta Program dan Kegiatan. Rencana Kerja dan Pendanaan memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2022. Penutup memuat tentang ringkasan Renja serta langkah-langkah yang akan mengimplementasikan Renja Inspektorat Kabupaten Tahun 2022.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Cirebon ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Inspektorat untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Dengan adanya Renja Inspektorat Kabupaten Cirebon ini diharapkan menjadi acuan bagi Inspektorat dan seluruh *stakeholder* Inspektorat untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Sumber, Juni 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**



Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cirebon	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Inspektorat	41
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	51
BAB V PENUTUP	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perubahan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;

21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2009 – 2014;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
38. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.12);
39. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
40. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen dan pedoman kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Terwujudnya aparatur yang profesional, handal dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;
- c. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang berhasil agar lebih ditingkatkan lagi.

- d. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif dalam kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022
- e. Memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan
- f. Memberikan gambaran tentang target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1. Latar Belakang menjelaskan pengertian, proses, keterkaitan dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/I dan Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
2. Landasan Hukum menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
3. Maksud dan Tujuan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD
4. Sistematika Penulisan, susunan garis besar isi dokumen dan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Inspektorat.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi anggaran program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisi uraian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun berikutnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Subbab ini berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Inspektorat

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

3.3. Program dan Kegiatan

Subbab ini berisi perumusan program dan kegiatan didasarkan atas faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Subbab ini berisi perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

Evaluasi pelaksanaan perangkat daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. Evaluasi dimaksud disusun untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Selain itu juga untuk meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2022.

Evaluasi Rencana Kerja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun.

Sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) bidang urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) serta Urusan Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan.

Tabel II.1.
Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

Sasaran	Indikator	KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA 2020-2024		Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja
		2019	2020	2021		
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	50,58	55,00	55	56,18	104 %
Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK Ri di Kab. Cirebon	52,00	65,00	70,00	73	108,75%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	0	85,00	86,00	84	97,67%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat yang pada Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa belum semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi di lapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Selain itu alokasi anggaran untuk pengawasan juga masih belum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Permen, hal ini terkendala karena adanya efisiensi anggaran untuk penanganan covid-19.

Hasil evaluasi keuangan Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Cirebon mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 22.705.700.574 (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.2
Rincian Belanja Inspektorat Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
5.1.	Belanja Operasional	21.922.231.574
5.1.01.	Belanja Pegawai	14.994.543.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.927.688.574
5.2.	Belanja Modal	783.469.000
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	783.469.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	22.705.700.574

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) SubKegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 22.705.700.574 (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.054.474.281 (*Dua Puluh Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) atau 88,32%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
BELANJA				
BELANJA NON URUSAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,873,589,574	15,715,927,498	1,157,662,076	93.14%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,528,100	14,242,000	286,100	98.03%

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,854,000	3,760,900	93,100	97.58%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,269,600	3,166,600	103,000	96.85%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,779,500	1,708,000	71,500	95.98%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,625,000	5,606,500	18,500	99.67%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,006,003,800	13,915,240,529	1,090,763,271	92.73%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,990,743,000	13,900,153,129	1,090,589,871	92.72%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,281,500	6,236,400	45,100	99.28%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,970,000	3,917,400	52,600	98.68%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,009,300	4,933,600	75,700	98.49%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,380,000	5,291,700	88,300	98.36%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,380,000	5,291,700	88,300	98.36%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	766,909,150	759,812,561	7,096,589	99.07%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,916,000	7,893,800	22,200	99.72%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	544,431,200	539,176,000	5,255,200	99.03%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,000,000	17,280,000	720,000	96.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,025,600	29,964,600	61,000	99.80%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,997,000	35,760,000	237,000	99.34%
Penyediaan Bahan/Material	29,766,000	29,487,100	278,900	99.06%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95,879,750	95,487,061	392,689	99.59%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,893,600	4,764,000	129,600	97.35%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239,574,000	238,900,000	674,000	99.72%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196,550,000	196,550,000	576,000	98.45%
Pengadaan Mebel	43,024,000	42,350,000	674,000	98.43%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144,599,424	116,758,064	27,841,360	80.75%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144,599,424	116,758,064	27,841,360	80.75%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696,595,100	665,682,644	30,912,456	95.56%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,670,000	89,854,300	9,815,700	90.15%

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219,140,000	199,287,700	19,852,300	90.94%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,710,000	11,970,000	740,000	94.18%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365,075,100	364,570,644	504,456	99.86%
BELANJA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	5,832,111,000	4,338,546,783	1,493,564,217	74.39%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4,030,779,100	3,308,574,300	722,204,800	82.08%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,698,358,800	2,361,583,300	336,775,500	87.52%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	240,721,200	210,433,200	30,288,000	87.42%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	209,033,400	207,137,400	1,896,000	99.09%
Reviu Laporan Kinerja	344,218,400	263,583,100	80,635,300	76.57%
Reviu Laporan Keuangan	175,960,300	169,530,800	6,429,500	96.35%
Pengawasan Desa	718,127,500	716,734,500	1,393,000	99.81%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1,010,298,000	794,164,300	216,133,700	78.61%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,332,420,300	946,991,000	385,429,300	71.07%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,332,420,300	946,991,000	385,429,300	71.07%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,801,331,900	1,029,972,483	771,359,417	57.18%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	277,564,100	214,200,785	63,363,315	77.17%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	114,805,600	98,871,089	15,934,511	86.12%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	162,758,500	115,329,696	47,428,804	70.86%
Pendampingan dan Asistensi	1,523,767,800	815,771,698	707,996,102	53.54%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1,061,483,900	416,476,098	645,007,802	39.24%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	104,657,200	50,309,900	54,347,300	48.07%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	357,626,700	348,985,700	8,641,000	97.58%
JUMLAH BELANJA	22,705,700,574	20,054,474,281	2,651,226,293	88.32%

Sumber : LRA 2021, Subbag Program dan Keuangan

Adapun pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD sampai dengan dengan Bulan Mei Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 22.274.226.574 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus duapuluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat) terealisasi sampai

dengan Bulan Mei Tahun 2022 sebesar Rp. 8.156.342.946 (delapan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau 36,61%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.4
Realisasi Anggaran sd. Mei 2022

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU AGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	23.207.015.574,00	8.156.342.946,00	15.050.672.628,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.616.155.100	1.373.010.500	3.243.144.600
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.313.072.400	979.487.000	2.333.585.400
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	290.775.200	8.773.200	282.002.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	231.454.800	85.500.000	145.954.800
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	525.543.200	205.555.300	319.987.900
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	217.097.800	149.542.500	67.555.300
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	862.490.700	276.224.000	586.266.700
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.185.710.700	253.892.000	931.818.700
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.303.082.700	393.523.500	909.559.200
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	168.750.500	16.937.400	151.813.100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.134.332.200	376.586.100	757.746.100
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.124.739.100	260.939.321	863.799.779
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	354.341.500	21.130.000	333.211.500
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	129.382.000	21.130.000	108.252.000
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	224.959.500	0	224.959.500
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	770.397.600	239.809.321	530.588.279
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	328.793.600	218.718.921	110.074.679
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	95.904.400	0	95.904.400
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	345.699.600	21.090.400	324.609.200
6.01..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.466.121.374	6.522.393.125	10.943.728.249
6.01..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.429.200	13.516.200	36.913.000
6.01..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.650.000	5.958.000	2.692.000
6.01..01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.847.600	0	3.847.600
6.01..01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.117.100	0	2.117.100

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU AGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
6.01..01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.640.200	0	4.640.200
6.01..01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.392.500	0	6.392.500
6.01..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.608.200	6.826.200	10.782.000
6.01..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.173.600	732.000	6.441.600
6.01..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.637.836.800	5.861.011.719	9.776.825.081
6.01..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.592.039.000	5.840.169.919	9.751.869.081
6.01..01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.149.800	6.431.500	10.718.300
6.01..01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.822.200	2.427.100	4.395.100
6.01..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.163.200	11.983.200	180.000
6.01..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.662.600	0	9.662.600
6.01..01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.002.300	0	11.002.300
6.01..01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.551.300	0	4.551.300
6.01..01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.451.000	0	6.451.000
6.01..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	596.366.200	321.984.703	274.381.497
6.01..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.728.000	6.550.800	13.177.200
6.01..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.620.000	192.194.000	56.426.000
6.01..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.361.000	19.411.000	34.950.000
6.01..01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.200.000	6.400.000	12.800.000
6.01..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.025.600	12.436.500	17.589.100
6.01..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.997.000	14.900.000	21.097.000
6.01..01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	29.737.500	11.480.900	18.256.600
6.01..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.867.500	56.271.503	96.595.997
6.01..01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.829.600	2.340.000	3.489.600
6.01..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.417.000	8.247.000	16.170.000
6.01..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	24.417.000	8.247.000	16.170.000
6.01..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.734.400	50.438.044	94.296.356
6.01..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.734.400	50.438.044	94.296.356
6.01..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.001.335.474	267.195.459	734.140.015
6.01..01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.827.800	65.041.200	82.786.600

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU AGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
6.01..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.642.000	117.319.700	229.322.300
6.01..01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.330.000	11.610.000	36.720.000
6.01..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	458.535.674	73.224.559	385.311.115
J U M L A H		23.207.015.574,00	8.156.342.946,00	15.050.672.628,00

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Triwulan I disajikan dalam Tabel II.5 :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Berdasarkan pemaparan diatas maka capaian kinerja pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dapat dilihat berdasarkan Tabel. II.6. sebagai berikut :

Tabel II.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA		PERKIRAAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA S/D TAHUN BERJALAN			
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0	NON URUSAN									
0.00.	NON BIDANG URUSAN									
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar.								
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1	1	1	1	1	1	0	0
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA, RKA, DPA).	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	-	-
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	-	-
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Inspektorat	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	-	-
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi belanja	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA			PERKIRAAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA S/D TAHUN BERJALAN		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Program Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA	0	0
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.	68 pegawai	68 pegawai	68 pegawai	68 pegawai	100%	68 pegawai	-	-
01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekon akuntansi bulanan, semesteran dan akhir tahun	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	-	-	-	-
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	-	-
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran.	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	-	-
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA	1 BA	
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekon aset bulanan, semesteran dan akhir tahun	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100 %	12 Dok	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA		PERKIRAAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA S/D TAHUN BERJALAN			
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0.00.01.2.06.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA	-	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	8 jenis	-	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 unit	7 unit	8 unit	134 unit	100%	12 jenis	-	
01.2.06.03.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12 jamuan	12 jamuan	12 jamuan	12 jamuan	96%	12 jamuan	-	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	-	
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	-	
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	42 jenis	42 jenis	40 jenis	40 jenis	100%	42 jenis	-	
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	100%	40 Laporan	-	
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	0	0	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA			PERKIRAAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA S/D TAHUN BERJALAN		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA	1 BA		
01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	1 unit	100%	9 unit	9 unit		
01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang disediakan	8 unit	8 unit	12 unit	100%	20 unit	20 unit		
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA	1 BA		
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis rekening	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis		
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA	1 BA		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA			PERKIRAAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA S/D TAHUN BERJALAN		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Kegiatan Program Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang diurus perjinannya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan jumlah kendaraan yang diurus pajak kendaraannya	61 unit	61 unit	55 unit	55 unit	100%	61 unit	61 unit	
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	-	-	-	-				
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	10.000	1.760	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan								
		Persentase Pelanggaran Pegawai								
02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA	1 BA	
02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	-	-	44 Obrik	65 Obrik	144,44 %	1 Laporan	1 Laporan	
02.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan	-	-	75 Obrik	96 Obrik	128 %	96 Laporan	96 Laporan	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA			PERKIRAAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA S/D TAHUN BERJALAN		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu	-	-	6 Laporan	12 Laporan	200 %	368 Laporan		
02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan		
02.2.01.05.	Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan	-	-	424 obrik	208 obrik	49.05%	212 Laporan		
02.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prosentase tindak lanjut temuan	-	-	24 Laporan	14 Laporan	58.33 %	763 Laporan		
02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA		
02.2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	-	-	156 LHP	87 LHP	55.76%	1 Laporan		
03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal								
03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA			PERKIRAAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN RENJA S/D TAHUN BERJALAN			
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Fasilitasi Pengawasan									
03.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Laporan Pelaksanaan Gelarwasda, Rakorwasda dan Rakorwasnas	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	-	-	
03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA			
03.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Laporan Kegiatan Penilaian Internal Reformasi Birokrasi	-	-	2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	-	-	
03.2.02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dokumen hasil survey penilaian integritas (SPI)	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-	

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2021

Tabel II.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Semester I Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun Laju (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5 x 100%	
I	Meningkatnya Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	65	1.616.100.400	0	1.616.100.400	60	4.518.436.098	0	899.452.700	60	5.417.888.798	0,92	3,35
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kapabilitas APiP	3	1.131.300.400		239.809.321	3	4.074.036.098	3	224.959.500	6	4.298.995.598	2	3,80
			persentase peningkatan SDM Pengawas berkompeten	76	484.800.000		1.373.010.500	74	444.400.000	76	674.493.200	150	1.118.893.200	1,97	2,31
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	1	484.800.000	1	0	1	444.400.000	1	224.959.500	2	669.359.500	2	1,38
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APiP	3	484.800.000	0	0	3	444.400.000	3	224.959.500	6	669.359.500	2	1,38

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun Laju (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)		
				1	1.131.300.400		1	239.809.321	1	4.074.036.098	1	674.493.200	2	4.748.529.298	2
		Pendampingan dan Asistensi	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	32	607.686.200	0	218.718.921	42	416.476.098	32	328.793.600	74	745.269.698	2,31	1,23
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SKPD yang dinilai maturitas SPIP	1	523.614.200	0	21.090.400	1	348.985.700	1	345.699.600	2	694.685.300	2	1,33
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen Laporan Kegiatan UPP SABER PUNGLI	75	18.537.741.860	75	18.537.741.860	70	3.308.574.300	75	18.537.741.860	145	21.846.316.160	1,93	1,18
II	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	100	16.269.146.490	100	1.373.010.500	100	3.308.574.300	100	4.616.155.100	200	7.924.729.400	2	0,49
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Peningkatan Pengawasan Internal Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	14.518.179.890	1	979.487.000	1	2.361.583.300	1	3.313.072.400	2	5.674.655.700	2	0,39
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	4	6.516.913.348	0	8.773.200	65	210.433.200	4	290.775.200	69	501.208.400	17,25	0,08

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)	
				96	3.409.464.512		48	85.500.000	96	207.137.400	96	231.454.800	192	438.592.200
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan	1	911.930.880	0.50	205.555.300	12	525.543.200	13	789.126.300	13	0,87	
		Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu	1	380.000.000	0.75	149.542.500	4	217.097.800	5	386.628.600	5	1,02	
		Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu	212	1.228.470.650	0	276.224.000	208	862.490.700	420	1.579.225.200	1,98	1,29	
		Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan	80	1.835.650.500	44	253.892.000	14	1.185.710.700	94	1.979.875.000	1,17	1,08	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prosentase tindak lanjut temuan	1	1.750.966.600	1	393.523.500	1	1.303.082.700	2	2.250.073.700	2	1,29	
		Pengelolaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	254.375.000	0	16.937.400	0	168.750.500	20	168.750.500	1	0,66	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dokumen Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10	5.000.000	0				10	0	1	0,00	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi.	60	1.486.591.600	11	376.586.100	87	1.134.332.200	147	2.081.323.200	2,45	1,40	
			Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus											

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)	Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)	
				4	5.000.000		0	17		21	0		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Laporan Probit Audit	100	2.268.595.370	100	264.510.685	100	225.286.400	200	489.797.085	2	0,22
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	1	1.991.265.270	1	214.200.785	1	129.382.000	2	343.582.785	2	0,17
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Laporan Pelaksanaan Gelarwasda, Rakorwasda dan Rakorwasnas	4	1.986.265.270	0	21.130.000	2	129.382.000	6	228.253.089	1,5	0,11
			Laporan hasil aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12	5.000.000		115.329.696	1		13	115.329.696	1,08	23,07
		Pendampingan dan Asistensi	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1	277.330.100	1	50.309.900	1	95.904.400	2	146.214.300	2	0,53

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)	
				1	2		1	2	1	2	1	2		
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Laporan Kegiatan Penilaian Internal Reformasi Birokrasi	1	102.008.600	0	0	1	95.904.400	1	2	146.214.300	2	1,43
III	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	24.511.980.914	87	7.062.694.625	86	15.636.135.562	87	173	40.148.116.476	1,99	1,64
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	19.167.806.250	100	1.188.166.706	100	1.701.361.333	100	200	20.869.167.583	2	1,09
			Meningkatnya persentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100	178.386.000	100	5.874.527.919	100	13.934.774.229	100	200	14.113.160.229	2	79,12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	103.578.240	1	13.516.200	1	14.242.000	1	2	64.671.200	2	0,62
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		tersusunnya dokumen perencanaan sektoral	2	17.453.040	1	5.958.000	2	3.760.900	2	4	12.410.900	2	0,71

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)	Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1	3.923.500	0	0	1	3.166.600	1	3.847.600	2	7.014.200	2	1,79
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Inspektorat	1	2.135.400	0	0	1	1.708.000	1	2.117.100	2	3.825.100	2	1,79
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1	4.657.300	0	0			1	4.640.200	1	4.640.200	1	1,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat	1	6.465.500	0	0			1	6.392.500	1	6.392.500	1	0,99
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi belanja	3	48.400.000	2	6.826.200	2	5.606.500	3	17.608.200	5	23.214.700	1,66 666 667	0,48
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Inspektorat	1	20.543.500	0,33	732.000			1	7.173.600	1	7.173.600	1	0,35
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	16.116.902.250	1	5.861.011.719	1	13.915.240.529	1	15.637.836.800	2	29.553.077.329	2	1,83
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	68	15.999.859.050	5,60	5.840.169.919	86	13.900.153.129	68	15.592.039.000	154	29.492.192.129	2,26 470 588	1,84

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)	
				12	1		4	12	12	12	12	12	24	17.149.800
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12	54.735.500	4	6.431.500	12	17.149.800	24	17.149.800	2	0,31	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekon akuntansi bulanan, semesteran dan akhir tahun	12	7.600.700	4	2.427.100	12	6.822.200	24	13.058.600	2	1,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	14.520.000	1	11.983.200	1	12.163.200	2	16.080.600	2	1,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1	9.680.000	0	0	1	9.662.600	2	14.596.200	2	1,51	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	55.935.800	1	0	1	11.002.300	2	16.294.000	2	0,29	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4.575.000	0	0	0	4.551.300	1	4.551.300	1	0,99	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekon aset bulanan, semesteran dan akhir tahun	12	6.509.800	0	0	12	6.451.000	24	11.742.700	2	1,80	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)	
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1.483.090.600	1	321.984.703	1	759.812.561	1	596.366.200	2	1.356.178.761	2	0,91
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12	19.728.000	4	6.550.800	8	7.893.800	12	19.728.000	20	27.621.800	1,66 666 667	1,40
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	605.000.000	4	192.194.000	8	539.176.000	10	248.620.000	18	787.796.000	1,8	1,30
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12	75.850.500	2	19.411.000	0	-	12	54.361.000	12	54.361.000	1	0,72
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	17	21.780.000	4.23	6.400.000	12	17.280.000	17	19.200.000	29	36.480.000	1,70 588 235	1,67
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	40.414.000	5	12.436.500	12	29.964.600	12	30.025.600	24	59.990.200	2	1,48
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	48.024.000	0.64	14.900.000	2	35.760.000	2	35.997.000	4	71.757.000	2	1,49
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	42	42.592.000	18	11.480.900	40	29.487.100	42	29.737.500	82	59.224.600	1,95 238 095	1,39

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)	
				40	153.065.000		30	56.271.503	40	95.487.061	40	152.867.500	80	248.354.561
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40	153.065.000	30	56.271.503	40	152.867.500	80	248.354.561	2	1,62	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	24	5.921.300	10	2.340.000	24	5.829.600	48	10.593.600	2	1,79	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	4.185.942.650	1	598.986.544	1	24.417.000	2	300.283.128	2	0,07	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan					1	196.550.000	1	196.550.000	0	0	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	20	247.566.000	1	8.247.000	12	24.417.000	32	66.767.000	1,6	0,27	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	540.301.500	1	540.301.500	1	144.734.400	2	261.492.464	2	0,48	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening	3	181.500.000	1.25	50.438.044	3	144.734.400	6	261.492.464	2	1,44	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (suboutput) Tahun 2022		Capaian Kinerja sampai dengan Semester I	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)	
				1	10		1	10	1	10	1	10	1	10
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	10	267.195.459	665.682.644	1	10	1.001.335.474	2	1.667.018.118	2	1,23
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang diurus perijinannya	10	10	65.041.200	89.854.300	10	10	147.827.800	20	237.682.100	2	1,50
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan jumlah kendaraan yang diurus pajak kendaraannya	61	61	117.319.700	199.287.700	55	61	346.642.000	116	545.929.700	1,90 163 934	1,47
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	21	21	11.610.000	11.970.000	18	21	48.330.000	39	60.300.000	1,85 714 286	1,09
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	2	2	73.224.559	364.570.644	1	2	458.535.674	3	823.106.318	1,5	1,79

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Cirebon tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga (*welfare state*).

Adapun isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Rencana Kerja ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya:

1. Melaksanakan pemeriksaan reguler, pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan khusus terhadap Perangkat Daerah (PD) yang strategis yaitu instansi-instansi penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah);
2. Melakukan pembinaan kepada aparatur PD atau desa untuk melaksanakan tata kelola administrasi umum maupun keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mendorong kepada PD dan desa agar meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Meminimalisir terhadap kegiatan-kegiatan PD yang berindikasi dapat merugikan keuangan daerah/negara;

5. Meningkatkan kualitas pengawasan maupun pemeriksaan agar Laporan Hasil Pemeriksaan dapat digunakan oleh Bupati atau pihak berwajib sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan;
6. Membina SDM Inspektorat Kabupaten Cirebon baik melalui diklat formal sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat P2UPD, diklat Ketua Tim, maupun bimbingan teknis dengan materi yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Propinsi Jawa Barat, BPKP Perwakilan Jawa Barat, BPK-RI Perwakilan di Bandung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar pemeriksaan lebih efektif dan berhasil guna;
8. Mendorong terbentuknya Satuan Tugas SPIP pada setiap PD agar berfungsi dengan baik;
9. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan menjalin komunikasi dengan obyek pemeriksaan agar meningkatkan kesadaran untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu;
10. Bersama dengan PD yang lain mengupayakan agar Opini WTP dari BPK dapat dicapai;
11. Membentuk Satgas OTT tingkat Kabupaten Cirebon agar kegiatan yang bersifat KKN dapat diminimalisir.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah:

1. Faktor penghambat:
 - a. Fungsi pendampingan yang masih belum optimal;
 - b. Belum tersedianya anggaran peningkatan SDM pengawasan;
 - c. Belum tersedianya kebijakan standarisasi ISO dalam manajemen SDM pengawasan.
2. Faktor pendorong:
 - a. Jumlah jabatan fungsional yang sudah memiliki kapasitas dan kompetensi yang sudah tersertifikasi;
 - b. Jumlah anggaran yang dapat dipenuhi menyesuaikan dengan kebutuhan belanja.

Upaya-upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam rangka menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang:

1. Peningkatan Kinerja yang Telah Dicapai

1.1 Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pemberantasan Korupsi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

- a) Membangun integritas aparatur melalui penandatanganan Pakta Integritas mulai dari Bupati sampai dengan pejabat struktural dan fungsional serta pemangku jabatan strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b) Menyusun dan merumuskan pembentukan Lembaga Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
- c) Menyusun dan merumuskan Modul Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas;

1.2 Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat

- a) Peningkatan bimbingan teknis dan diklat bagi auditor dan tenaga pemeriksa melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat;
- b) Merumuskan dan menetapkan kode etik bagi auditor dan tenaga pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cirebon.

1.3 Peningkatan Anggaran Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagai PD Khusus

- a) Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor melalui kebijakan Remunerasi berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS;
- b) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- d) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e) Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan

perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);

- f) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif untuk fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pakta Integritas;
- g) Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal;
- h) Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan yang berstandar ISO 9001 : 2000;

1.4 Kontribusi terhadap Pelaksanaan Revitalisasi Tindak Lanjut Percepatan Peningkatan Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon

- a) Menyusun sistem dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam program reformasi birokrasi;
- b) Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi :
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

2. Peningkatan Kinerja yang Akan Dicapai

- a) Meningkatkan efektivitas Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Cirebon 2019-2024.
- b) Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- d) Penataan kapasitas dan kualitas Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;
- e) Membangun kegiatan pemantauan Sistem Pengawasan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang transparan dan akuntabel meliputi:
 - 1. Online Sistem Internal Pengawasan Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Hasil Pemeriksaan/Audit Operasional;

- b. Hasil Pemeriksaan/Audit Tujuan Tertentu;
 - c. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal dan Eksternal.
2. Website Sistem Informasi dan Partisipasi :
- a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- f) Pengembangan Manajemen Mutu Pengawasan yang berstandar ISO 9001: 2000 di Lingkungan Inspektorat yang lebih komprehensif;
- g) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif;
- h) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk :
- 1. Tunjangan kelangkaan profesi;
 - 2. Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - 4. Penanganan pengaduan;
 - 5. Pemeriksaan/Audit dengan tujuan tertentu atau Pemeriksaan/Audit Operasional.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam arah kebijakan bidang aparatur negara Tahun 2014 hingga Tahun 2019, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan. Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013. Serta dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Cirebon.

Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Cirebon tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dan *Early Warning System*, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai

pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Cirebon selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya manusia sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun anggaran.

Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Cirebon yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten Bab III pasal 18 menyebutkan Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Pembantu dihapus. Berdasarkan hal itu maka peraturan perundangan yang berkaitan dengan susunan organisasi dalam proses revisi yang disesuaikan dengan kedua peraturan perundangan tersebut.

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Program Pusat adalah:

1. UPP Saber Pungli
2. Unit Pengendalian Gratifikasi
3. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Monitoring Center for Prevention (MCP)
4. Peningkatan SPIP
5. Kapabilitas APIP
6. TLHP Eksternal/BPK

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

3.2.1. Tujuan :

Tujuan Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2.2. Sasaran :

1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi, dengan indikator kinerja nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon; dan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Program

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan diatas, dilakukan dengan menetapkan program-program yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja-SKPD. Rancangan Rencana Kerja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Terdapat 3 program yang

digunakan dan selaras dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Untuk penjabaran Kegiatan dan Subkegiatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Program dan Kegiatan Tahun 2022

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3	Reviu Laporan Kinerja
4	Reviu Laporan Keuangan
5	Pengawasan Desa
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
B	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
7	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
8	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
C	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
D	Pendampingan dan Asistensi
11	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
12	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
13	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
E	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
16	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
17	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
18	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
F	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
23	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
G	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
26	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
27	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
H	Administrasi Umum Perangkat Daerah
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
31	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
32	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
33	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
34	Penyediaan Bahan/Material
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
36	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
I	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
37	Pengadaan Mebel
J	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
K	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel III.2. berikut :

**Tabel III.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Cirebon**

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat	100 Prosen	21,771,834,840	APBD	100 Prosen	22,784,521,247
		Meningkatnya persentase sarana dan prasarana aparatur	Inspektorat	100 Prosen		APBD	100 Prosen	
		Meningkatnya persentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	Inspektorat	100 Prosen		APBD	100 Prosen	
		Meningkatnya persentase sistem perencanaan sektoral yang transparan, akuntabel dan informatif	Inspektorat	100 Prosen		APBD	100 Prosen	
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Inspektorat		103,578,240	APBD		116,854,344
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral	Inspektorat	2 Dok	17,453,040	APBD	2 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	1 Dok	3,923,500	APBD	1 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Inspektorat	Inspektorat	1 Dok	2,135,400	APBD	1 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Inspektorat	1 Dok	4,657,300	APBD	1 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat	Inspektorat	1 Dok	6,465,500	APBD	1 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Belanja	Inspektorat	3 Dok	48,400,000	APBD	3 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen Evaluasi Kinerja Inspektorat	Inspektorat	1 Dok	20,543,500	APBD	1 Dok	
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Inspektorat		16,116,902,250	APBD		16,919,148,603

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022			PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya setiap bulan	Inspektorat	68 Pegawai	15,999,859,050	APBD	68 Pegawai
0.00.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	12 Dok	54,735,500	APBD	12 Dok
0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekon akuntansi bulanan, semester dan akhir tahun	Inspektorat	12 Laporan	7,600,700	APBD	12 Laporan
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Inspektorat	1 Laporan	14,520,000	APBD	1 Laporan
0.00.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat	1 Dok	14,753,500	APBD	1 Dok
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Inspektorat	1 Laporan	9,680,000	APBD	1 Laporan
0.00.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	1 Dok	15,753,500	APBD	1 Dok
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Inspektorat		55,935,800	APBD	75,403,800
0.00.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	1 Dok	6,750,500	APBD	1 Dok
0.00.01.2.03.02.	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diamankan	Inspektorat	10 Unit	5,675,000	APBD	10 Unit
0.00.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dilakukan appraisal (penilaian)	Inspektorat	10 Unit	7,800,500	APBD	10 Unit
0.00.01.2.03.04.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	1 Dok	15,875,000	APBD	1 Dok
0.00.01.2.03.05.	Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	1 Dok	4,575,000	APBD	1 Dok
0.00.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekon aset bulanan, semesteran dan akhir tahun	Inspektorat	12 Laporan	6,509,800	APBD	12 Laporan
0.00.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	1 Dok	8,750,000	APBD	1 Dok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian		Inspektorat		666,686,500	APBD		721,501,300
0.00.01.2.05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Inspektorat	Inspektorat	1 Unit	10,350,000	APBD	1 Unit	
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	75 Stel	40,000,000	APBD	80 Stel	
0.00.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat	1 Dok	17,500,500	APBD	1 Dok	
0.00.01.2.05.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Inspektorat	1 Dok	25,850,500	APBD	1 Dok	
0.00.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat	1 Dok	7,850,500	APBD	1 Dok	
0.00.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Inspektorat	45 Pegawai	153,850,000	APBD	45 Pegawai	
0.00.01.2.05.11.	Sosialisasi Aturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	150 orang	175,835,000	APBD	150 orang	
0.00.01.2.05.10.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	150 orang	235,450,000	APBD	150 orang	
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Inspektorat		1,474,010,600	APBD		1,497,920,600
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Inspektorat	8 jenis	10,648,000	APBD	8 jenis	
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Inspektorat	10 unit	605,000,000	APBD	12 unit	
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Inspektorat	12 unit	75,850,500	APBD	12 unit	
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Inspektorat	17 jamuan	21,780,000	APBD	22 jamuan	
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Inspektorat	12 jenis	40,414,000	APBD	12 jenis	
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	2 jenis	48,024,000	APBD	2 jenis	
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	Inspektorat	42 jenis	42,592,000	APBD	42 jenis	
0.00.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Inspektorat	20 jamuan	19,965,000	APBD	20 jamuan	
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat	40 laporan	153,065,000	APBD	40 laporan	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022			PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	Inspektorat	24 laporan	5,921,300	APBD	24 laporan	
0.00.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat	1 dok	450,750,800	APBD	1 dok	
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat		2,185,942,650	APBD		2,222,824,300
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	9 dok	500,700,000	APBD	9 dok	
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Pengawasan	Inspektorat	20 unit	590,550,000	APBD	20 unit	
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Inspektorat	20 unit	247,566,000	APBD	20 unit	
0.00.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Inspektorat	1 unit	45,750,450	APBD	1 unit	
0.00.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya	Inspektorat	5 unit	45,750,850	APBD	5 unit	
0.00.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan	Inspektorat	1 bangunan	570,675,000	APBD	1 bangunan	
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	1 unit	137,450,000	APBD	1 unit	
0.00.01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	1 dok	47,500,350	APBD	1 dok	
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat		540,301,500	APBD		571,304,500
0.00.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang terdistribusikan	Inspektorat	750 dok	65,750,500	APBD	750 dok	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening	Inspektorat	3 jenis	181,500,000	APBD	3 jenis	
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	1 paket	135,700,500	APBD	1 paket	
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	1 paket	157,350,500	APBD	1 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat		628,477,300	APBD		659,563,800
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan jumlah kendaraan yang diurus perijinannya	Inspektorat	10 unit	117,152,200	APBD	10 unit	
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan jumlah kendaraan yang diurus pajak kendaraannya	Inspektorat	61 unit	24,200,000	APBD	61 unit	
0.00.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	1 dok	47,500,500	APBD	1 dok	
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	Inspektorat	21 unit	15,379,100	APBD	23 unit	
0.00.01.2.09.07.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Inspektorat	1 dok	75,650,500	APBD	1 dok	
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Inspektorat	2000 m2	157,300,000	APBD	2000 m2	
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	1 dok	53,750,000	APBD	1 dok	
0.00.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	1 dok	137,545,000	APBD	1 dok	
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Inspektorat		17,438,842,260	APBD		19,209,942,947
6.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat	100 persen	13,559,146,490	APBD	100 persen	14,986,984,707
6.01.02.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat		13,018,179,890	APBD		14,426,089,307

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.01.02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu	Inspektorat	46 LHP	6,516,913,348	APBD	48 LHP	
6.01.02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu	Inspektorat	77 LHP	3,409,464,512	APBD	79 LHP	
6.01.02.2.01.05.	Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat	6 laporan	911,930,880	APBD	6 laporan	
6.01.02.2.01.06.	Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	4 laporan	380,000,000	APBD	4 laporan	
6.01.02.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Inspektorat	424 LHP	1,228,470,650	APBD	424 LHP	
6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Inspektorat	1 dok	235,750,000	APBD	1 dok	
6.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dokumen Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	556 LHP	335,650,500	APBD	556 LHP	
		Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Inspektorat		540,966,600	APBD		560,895,400
6.01.02.2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Inspektorat	1 dok	254,375,000	APBD	1 dok	
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Laporan Probit Audit	Inspektorat	10 dok	286,591,600	APBD	10 dok	
		Persentasi Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Inspektorat	60 LHP		APBD	60 LHP	
		Meningkatnya persentase kualitas pengawasan	Inspektorat	4 dok		APBD	4 dok	
		Persentasi Peningkatan SDM Pengawas berkompeten	Inspektorat	100 Prosen	3,879,695,770	APBD	100 Prosen	4,222,958,240
6.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Inspektorat	3,1 nilai		APBD	3,15 nilai	
6.01.03.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Laporan Pelaksanaan Gelanwasda, Rakorwasda dan Rakorwasnas	Inspektorat	100 prosen		APBD	100 prosen	
		Laporan hasil aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat		2,471,065,270	APBD		2,696,434,840
6.01.03.2.01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	1 dok	1,986,265,270	APBD	1 dok	
6.01.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi		Inspektorat	12 laporan		APBD	12 laporan	
6.01.03.2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SKPD yang dinilai maturitas SPIP	Inspektorat	100 persen	484,800,000	APBD	100 persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.01.03.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Laporan Kegiatan Penilaian Internal Reformasi Birokrasi	Inspektorat		1,408,630,500	APBD		1,526,523,400
6.01.03.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen Laporan Kegiatan UPP SABER PUNGLI	Inspektorat	42 SKPD	607,686,200	APBD	42 SKPD	
6.01.03.2.02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dokumen hasil survey penilaian integritas (SPI)	Inspektorat	1 dok	102,008,600	APBD	1 dok	
		JUMLAH			39,210,677,100			41,994,464,194

Sumber : Renstra Inspektorat 2019-2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Inspektorat Tahun 2022 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Keuangan

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,453,040
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	3,923,500
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,135,400
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,657,300
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6,465,500
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48,400,000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat	20,543,500
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,999,859,050
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54,735,500
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7,600,700
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,520,000
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14,753,500
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9,680,000
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15,753,500
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6,750,500
16	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	5,675,000
17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7,800,500
18	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15,875,000
19	Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4,575,000
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,509,800
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8,750,000
22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10,350,000
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40,000,000
24	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17,500,500

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
25	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25,850,500
26	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,850,500
27	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153,850,000
28	Sosialisasi Aturan Perundang-undangan	175,835,000
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	235,450,000
30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,648,000
31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	605,000,000
32	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75,850,500
33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,780,000
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,414,000
35	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48,024,000
36	Penyediaan Bahan/Material	42,592,000
37	Fasilitas Kunjungan Tamu	19,965,000
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,065,000
39	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,921,300
40	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	450,750,800
41	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500,700,000
42	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	590,550,000
43	Pengadaan Mebel	247,566,000
44	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,750,450
45	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	45,750,850
46	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	570,675,000
47	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137,450,000
48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47,500,350
49	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65,750,500
50	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181,500,000
51	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135,700,500
52	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157,350,500
53	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117,152,200
54	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,200,000
55	Pemeliharaan Mebel	47,500,500

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,379,100
57	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75,650,500
58	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157,300,000
59	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,750,000
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137,545,000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6,516,913,348
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3,409,464,512
3	Reviu Laporan Kinerja	911,930,880
4	Reviu Laporan Keuangan	380,000,000
5	Pengawasan Desa	1,228,470,650
6	Kerjasama Pengawasan Internal	235,750,000
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	335,650,500
8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	254,375,000
9	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	286,591,600
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1,986,265,270
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	484,800,000
3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	607,686,200
4	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	102,008,600
5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	523,614,200
6	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	175,321,500

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2022 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Cirebon sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Cirebon yang merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi, mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.